

## STUDI ISLAM DAN RADIKALISME PENDIDIKAN DALAM KONTEKS MASYARAKAT MAJEMUK

Oleh : Dr. Ahmad Ali Riyadi

### Pendahuluan

Konflik dan krisis yang mencuat akibat kebekuan tafsir manusia atas agama dan ideologi di kalangan masyarakat modern telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dewasa ini. Di Indonesia, gerakan radikalisme Islam dan mengerasnya fanatisme agama-agama sebagaimana dalam berbagai kasus kerusuhan di Flores tahun 1995, sampai kemudian Ketapang, Sambas, Kupang dan Ambon Maluku tahun 1999 dan hingga kini muncul kasus terorisme dengan dalih jihad atas nama Islam (2009), tidak lepas atas tafsir manusia terhadap agama dan ideologi yang mengitarinya. Ada kecemasan bahwa krisis dan konflik yang mencuat akibat kebekuan agama dan ideologi di kalangan masyarakat modern akan semakin menjadi persoalan yang meluas. Menyikapi munculnya berbagai kekerasan atas nama agama dan ideologi ini, oleh para analis sosial politik mungkin tidak menduga bahwa akar permasalahan konflik justru muncul dari persoalan lembaga pendidikan agama dan sosial, justru mereka menduga lebih menitikberatkan pada ketimpangan sosial politik dan ekonomi sebagai akar permasalahan. Sangat sedikit yang menduga bahwa kekerasan-kekerasan itu disebabkan oleh model pendidikan yang diterapkan oleh institusi-institusi agama dan ideologi tertentu.

Pendidikan memang sudah terlanjur menjadi komitmen bersama bahwa pendidikan mempunyai peran yang luhur dan agung. Sifat yang agung ini ditunjukkan dari peran pendidikan yang dipahami sebagai pemberian bekal peserta didik untuk menghadapi masa depannya, juga peran pendidikan dipahami sebagai sarana untuk pencerdasan seseorang, negara dan bangsa. Sebegitu mulianya peran pendidikan sehingga orang tidak pernah merasa curiga terhadap makhluk yang bernama pendidikan. Ada paradoks, pada satu sisi pendidikan mengajarkan kedamaian dan keharmonisan, di sisi lain pendidikan pada kenyataannya telah mencetak teror dan kerusuhan. Ada apa dengan pendidikan? Apakah pendidikan tidak mampu lagi menyuguhkan penghargaan di tengah masyarakat plural? Pertanyaan lainnya bagaimana peran agama dalam pendidikan dan sosialnya? Tulisan berikut mencoba mengungkap akar permasalahan konflik yang muncul pada dewasa ini dalam perspektif agama dan pendidikan.

### Radikalisme Pendidikan sebagai Invasi Budaya

Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa pendidikan adalah sebagai sebuah gagasan atau rekayasa yang menimbulkan budaya. Rekayasa budaya atau disebut dengan invasi kultural merupakan penyerbuan dengan bantuan sarana budaya terhadap kebudayaan lain, sehingga terjadi penaklukan budaya yang pada akhirnya mengalami proses pemalsuan kultural atau keterasingan terhadap budayanya sendiri. Penyerbuan budaya lewat pendidikan inilah yang disebut radikalisme pendidikan atau pendidikan radikal.

Dari sini dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan merupakan sarana yang paling ampuh untuk pembentukan karakter pribadi seseorang serta propaganda nilai-nilai budaya yang dianggap penting bagi penggagas. Setahap demi setahap orang akan mengalami penyerbuan kultural dengan mengoper budaya asing yang menyergap dirinya. Dengan demikian, seseorang tersebut tidak akan dapat menghayati budayanya sendiri. Tentu hal ini akan membawa akibat buruk dari rekayasa pendidikan, yakni; pertama, menjauhkan seseorang dari tradisi dan nilai-nilai budayanya sendiri, kedua, memunculkan rasa keterasingan terhadap hakekat diri sendiri, serta kondisi sosiso budaya sendiri dan proses tidak mengenali jati dirinya sendiri, yang kemudian timbul rasa malu terhadap kekayaan budaya sendiri sebab dianggap inferior (*ndesani*).

Pendidikan menjadi sarana rekayasa yang dapat mengarahkan seseorang untuk mengikuti dan menyakini kebenaran yang didapatkan lewat kerangka berpikir keilmuan yang dihasilkan. Kerangka ini menjadikan seseorang tidak mampu keluar dari jeratan pemahaman ilmu yang didapatkan dari lembaga pendidikan. Indoktrinasi lebih mendominasi dan memaksakan kemauan ide-ide edukatif tanpa memperhatikan aspek kebutuhan, harapan dan aspirasi pengguna jasa pendidikan. Penggagas ingin membentuk pribadi pengguna jasa pendidikan sesuai dengan citra penggagas. Karena itu pengguna jasa pendidikan dirampas dari kata-kata, pikiran, bahasa, pengalaman hidup dan kebudayaannya, agar mudah diserbu dan diisi dengan nilai-nilai dan benda-benda asing yang cocok dengan kepentingan penggagas.

Oleh karena itu, lambat laun orang-orang yang ditaklukkan akan mengoper lalu mengasyiki semua peristiwa di sekitarnya tidak lagi dengan mata dan hati nurani sendiri akan tetapi menghayati semua kejadian di sekitarnya dengan keinginginan penggagas. Semakin patuh dan makin otomatis orang-orang yang diserbu itu menirukan pola tingkah laku para penyerbunya, maka akan dianggap semakin prima dan semakin sukseslah proses pendidikan. Oleh karena itu, proses pembudayaan disebut berhasil

apabila orang tunduk secara mutlak dan pasif menerima semua perintah yang diberikan oleh para penggagas.

Dalam realitas sejarah, peranan pendidikan sebagai sarana budaya ini dapat dicermati dari munculnya berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang dibentuk oleh kekuatan ormas-ormas maupun kekuatan politik kekuasaan. Misalkan munculnya berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang disokong oleh penggagas yang beraliansi pada kepentingan kebijakan politik tertentu. Misalkan dalam negara yang berbentuk sosialis akan berbeda dengan negara komunis, kapitalis, otokrasi, otoriter dan lainnya. Juga, dalam sejarah Islam hubungan antara pendidikan dan kebijakan politik dapat dilacak sejak masa-masa awal pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Kenyataan ini misalkan dapat dilihat dari pendirian banyak madrasah di Timur Tengah yang disponsori oleh penguasa politik. Contoh yang paling terkenal adalah Madrasah Nizamiyah di Bagdad yang didirikan sekitar tahun 1064 M oleh Wazir Dinasti Saljuk Nizam al-Mulk sebagai pendukung mazhab Sunni (Syafi'i). Lembaga ini merupakan lembaga tandingan Madrasah al-Azhar di Mesir yang pada awalnya didirikan Dinasti Fatimiyah untuk mendukung dan menyebarkan mazhab Syi'ah.

Fenomena tersebut, bahwa signifikansi dan implikasi politik dan pengembangan madrasah -- pendidikan Islam-- pada umumnya bagi penguasa Muslim sudah jelas. Madrasah-madrasah tersebut didirikan untuk menunjang kepentingan-kepentingan politik tertentu dari penguasa Muslim, yakni untuk mendukung, menciptakan dan memperkokoh citra penguasa sebagai orang-orang yang mempunyai kesalehan dan kepedulian kepada kepentingan umat dan lebih penting lagi sebagai pembela ortodoksi Islam. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi penguasa *vis a vis* rakyat.

Kepentingan terselenggaranya pendidikan telah membawa dampak rekayasa kebudayaan demi eksistensi kebudayaan penggagas itu sendiri. Kadangkala lembaga-lembaga pendidikan itu menjadi sarana yang ampuh sebagai mesin perang yang sangat mengerikan. Sebagai contoh pertarungan antara kelompok sunni dan kelompok syi'ah di negara-negara muslim menjadi kesalahan sejarah yang fatal akibat rekayasa pendidikan. Pertarungan ideologi-ideologi besar dunia, komunis, fasis, sosialis dan Islam, menjadi bukti lain yang mengantarkan pada pembasmian etnis.

#### **Peran Pendidikan Bagi Kemanusiaan**

Berdasarkan landasan berpikir tersebut perlu upaya reorientasi pendidikan Islam di tengah masyarakat yang majemuk (multikultural). Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan formula pendidikan yang bebas dari kepentingan penggagas. Sebab pendidikan akan menjadi ajang pendoktrinasi jika tidak dibarengi dengan prinsip yang netral terhadap penggagas. Bagaimana mungkin pendidikan akan menjadi humanis jika lembaga pendidikan itu digembok dengan berbagai kepentingan-kepentingan. Berikut beberapa hal prinsip pendidikan Islam yang bernuansakan kemanusiaan.

*Pertama*, fungsi menumbuhkan kesadaran magis (*magical consciousness*). Kesadaran ini dikembangkan dengan suatu keadaan kesadaran yang tidak mampu mengetahui hubungan atau kaitan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Seringkali terjadi dalam dunia pendidikan bahwa alumni sebuah lembaga pendidikan tidak mampu berkreasi dan berkarya serta selalu tetap berada di pinggiran arus pembangunan yang berjalan begitu cepat. Akibatnya, jumlah pengangguran justru banyak diisi oleh kelas menengah terpelajar. Ketidakterdayaan kelas terpelajar ini sebenarnya diakibatkan oleh sistem sebagai struktur pembelajaran yang telah menjerembabkannya ke dalam kemiskinan dan ketidakterdayaan.

Disebut menjerembabkan karena lembaga pendidikan telah membawa dampak pada alienasi (keterasingan) peserta didik terhadap dunia luar. Alienasi, dalam kerangka tradisional, dipahami bahwa peserta didik telah mempunyai persepsi bahwa sekolah atau lembaga pendidikan telah dianggap dapat menjanjikan kerja langsung, pada hal perkembangan dalam dunia kerja begitu cepat melebihi nalar keilmuan yang diajarkan di lembaga sekolah. Peserta didik telah dialienasikan oleh sekolah yang mengisolasi mereka ketika mereka bermaksud menjadi produsen dan konsumen dari pengetahuan mereka sendiri. Kenapa demikian? Karena begitu peserta didik belajar dan diajar di lembaga sekolah maka orang akan kehilangan inisiatif untuk tumbuh mandiri dan menutup diri terhadap hal-hal yang berkembang di luar pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kreatifitas dan kemampuan diukur dari nilai-nilai yang diatur lembaga pendidikan dan kesuksesan seseorang juga ditentukan oleh seberapa tinggi nilai evaluasi yang didapatkannya dan seberapa tinggi gelar keserjanaan yang diperolehnya. Lembaga pendidikan telah menjadi nilai konsumtif pasar kerja yang berkembang dengan memberikan janji-janji pengembangan potensi kerja yang menggiurkan. Sehingga lembaga pendidikan telah menjadi lembaga rekayasa sosial yang paling ampuh untuk membuat orang teralienasi.

Salah satu problem pendidikan Islam yang mengarah kepada alienasi adalah pengembangan kurikulum nalar klasik. Nalar klasik dipahami sebagai pandangan yang berkembang dan terbentuk pada masa lampau akan tetapi keberadaannya selalu diulang-ulang pada masa sekarang tanpa adanya upaya transformasi pemikiran untuk didekonstruksi sesuai dengan kondisi zaman. Nalar yang dikembangkan agama zaman sekarang adalah dunia nalar yang berkembang dalam dunia Arab Islam klasik. Nalar Arab

dipahami sebagai sejumlah prinsip dan kaidah yang dikemukakan oleh kultur Arab bagi penganutnya sebagai landasan untuk memperoleh pengetahuan. Himpunan pengetahuan itu secara tidak sadar telah menjadi episteme bagi kebudayaan Arab Islam yang lahir dari kumpulan tradisi pemikiran yang diwariskan dari peradaban Islam pada abad pertengahan. Masa kemunculan kebudayaan itu, diawali dengan masa kodifikasi (*'ashr tadwin*), yaitu masa di mana berlangsung proyek konstruksi budaya secara massif dalam pengalaman sejarah peradaban Islam, antara pertengahan abad 2 H dan pertengahan abad 4 H. yang pada akhirnya peradaban ini membentuk sebuah kerangka rujukan bagi pemikiran Arab Islam dengan segenap disiplin keilmuannya yang beragam. Tentunya, masa kodifikasi ini bukanlah sekedar proses pembakuan dan pembukuan berbagai disiplin keilmuan akan tetapi harus dipahami pula sebagai rekonstruksi kebudayaan secara menyeluruh dengan segenap persoalan yang dikandung oleh proses pembakuan, baik yang berupa eliminasi, suplemasi, dominasi, pembungkaman, manipulasi dan penafsiran yang kesemuanya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ideologis dan faktor-faktor sosio kultural yang beragam, yang secara tidak sadar telah diikuti secara "paksa" tanpa ada pengkritisan oleh pengikut-pengikut peradaban Arab Islam.

Nalar Arab ini kemudian menjadi sejumlah prinsip dan kaidah yang dikemukakan oleh kebudayaan Arab Islam bagi penganutnya sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan mengharuskan mereka untuk menjadikannya sebagai sarana memperoleh pengetahuan dan mengharuskan mereka untuk menjadikannya sebagai sistem pengetahuan, yaitu sebagai kumpulan dari konsep-konsep dan prosedur-prosedur yang memberikan pengetahuan secara tidak sadar sebagai episteme kultur Arab, yang pada akhirnya mengkristal mengisi sebuah peradaban yang statis dan absolut.

Ilmu pengetahuan Arab Islam yang muncul di dunia Arab yang semula diajarkan dengan nalar universal kemudian dibakukan melalui penafsiran tertentu yang diresmikan oleh lembaga umat sebagai sesuatu yang sudah selesai dan diajarkan secara terus menerus. Akibatnya umat Islam sekarang lebih mengenal produk pemahaman agama dari pada metode kemunculan produk, sehingga kreativitas berpikir menjadi statis. Pola pikir statis ini muncul sebagai akibat ketidakmampuan umat Islam dalam mendialogkan ilmu keislaman dengan fakta historis kealaman, sehingga menimbulkan alienasi dengan fakta.

*Kedua*, membangun kesadaran naif (*naïval consciousness*). Lembaga pendidikan sebagai sebuah keadaan kesadaran yang melihat keterbelakangan oleh faktor individu dari orang lain. Dalam kesadaran ini masalah, etika, kreativitas, need for achievement dianggap sebagai perubahan sosial.

Pendidikan membangun individu yang mempunyai watak *negative and diagnostic* dan *positive and remedial*. Yang pertama, adalah membentuk manusia yang anti terhadap otoritarisme dan absolutisme terhadap segala bentuk yang meliputi semua bidang kehidupan baik agama, moral, sosial, politik dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, adalah pendidikan berdasarkan pada suatu kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subyek yang memiliki potensi-potensi alamiah, terutama kekuatan-kekuatan mempertahankan diri untuk menghadapi dan mengatasi semua problem kehidupannya.

Pendidikan memberikan keyakinan baru akan pentingnya transformasi sosial sebagai bentuk kesadaran seseorang atas teori normatif pendidikan. Segala bentuk teori ilmu yang diajarkan hendaknya dapat membebaskan perilaku sehingga dapat membentuk kesalehan sosial, dalam bahasa agama disebut akhlaq karimah (saleh ritual dan saleh sosial sekaligus). Pendidikan yang awalnya untuk mengatur dan membekali potensi manusia harus dipahami secara produktif, namun kenyataannya justru menjadi sesuatu yang menakutkan dengan pemahaman yang dogmatik dan kaku. Hal ini dinyatakan dengan pemahaman out put pendidikan yang diukur dengan nilai serba hitam-merah. Nilai hitam jika peserta didik mendapatkan nilai yang tinggi dalam proses belajarnya begitu juga sebaliknya mendapat nilai merah jika peserta didik tidak mampu mendapatkan nilai standar yang telah ditentukan.

Model penilaian salah benar dalam mengukur kelulusan pendidikan tersebut lebih mengarah nalar pragmatis. Nalar pragmatisme dalam dunia pendidikan lebih diakibatkan oleh paradigma budaya konsumerisme kapitalis. Sifat dasar dari paradigma ini adalah demi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sifat dasar pembangunan telah membentuk karakter yang mendasari terselenggaranya pembangunan secara pragmatis. Sikap pragmatisme ini merupakan sebuah sikap cara berpikir demi efisiensi dan efektivitas.

Ada argumen sederhana bagi kemunculan dampak negatif pembangunan yakni sikap pembangunan yang bersifat pragmatis lebih banyak tidak mengindahkan unsur kemanusiaan sebagai bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Sebab yang ada dalam benak para penggagas pembangunan hanyalah bagaimana cara membangun sarana secara efektif dan efisien dengan secepat mungkin hingga hasilnya dapat dinikmati. Pada hal kehendak yang demikian, sebenarnya serupa dengan motif yang ada pada ilmu ekonomi klasik, yakni kapitalisme, yaitu dogma yang mengajarkan pada individu agar mampu mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin. Dari sinilah pembangunan kemudian membawa dampak negatif dengan munculnya hegemoni kultural dan politik dalam developmentalisme.

Sebagai dampaknya tentu seluruh aspek humanitas manusia telah terhegemoni pada budaya konsumerisme atau kebudayaan benda. Nilai-nilai kemanusiaan telah tercerabut dan digantikan dengan nilai-nilai kebendaan. Keakuan manusia tidak lagi difokuskan pada kesucian jiwa akan tetapi pada prestasi akumulasi dan konsumerisme materi. Kehidupan telah berubah menjadi corak hedonistik, yakni kesuksesan dirumuskan sebagai sesuatu yang mendatangkan kenikmatan fisik. Padahal kenikmatan fisik seringkali menjerumuskan pada penghancuran kehidupan.

Dalam konteks pendidikan, sebagai salah satu sasaran propaganda pembangunan, tidak bisa lepas dari bidikan pragmatisme sebagai eksekusi pembangunan bermazhab kapitalisme. Sebab realitas yang terjadi adalah kecenderungan menempatkan manusia sebagai pelaku atau robot pembangunan dan bukan manusia sebagai jiwa yang memiliki kompleksitas persoalan. Kritik ini diarahkan pada sistem pendidikan agama yang hanya sekedar membentuk manusia yang bermental dan berorientasi pada pembangunan dengan jargon profesionalisme. Karena bagaimanapun pembangunan membutuhkan keterlibatan pendidikan dalam rangka mensosialisasikan arti pentingnya pembangunan. Paradigma yang digunakan adalah paradigma sumber daya manusia dari teori ekonomi klasik. Teori ini menempatkan manusia sebagai bagian penting dari faktor produksi. Dengan mengasumsikan manusia sebagai faktor produksi, maka paradigma ini tentu saja mereduksi manusia pekerja menjadi obyek. Sementara subyeknya adalah kapitalisme. Maka dari itu, pendidikan merupakan jalur strategis untuk mewujudkan sumber daya manusia yang produktif. Tampaknya hanya dengan pendidikan yang diformalkan manusia akan dapat bekerja secara produktif. Pendidikan diformat semata-mata sebagai sertifikat yang harus dimiliki setiap orang untuk dapat bekerja. Jelasnya, adalah manusia dalam menempuh pendidikan hanya dipahami sebagai kerangka pragmatis mencari kerja. Ukuran sukses tidaknya seseorang dalam menempuh pendidikan ditentukan oleh kesuksesan seseorang dalam bekerja sesuai dengan bidang studi dalam pendidikan. Pendidikan tidak dipahami sebagai pengembangan keilmuan akan tetapi pendidikan dipahami sebagai pencarian pekerjaan yang bersifat praktis. Kenyataan bahwa pendidikan hanya sekedar diarahkan untuk memenuhi panggilan pembangunan dapat dibuktikan semakin melemahnya kesadaran manusia bahwa kehidupan itu diciptakan secara sosial.

*Ketiga*, membangun kesadaran kritis (*critical consciousness*). Kesadaran ini memandang sebab masalah dilihat dari sistem alam atau struktur sebagai sumber masalah. Kesadaran ini memberikan ruang bagi masyarakat agar mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam struktur yang ada dan mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur lembaga itu dibangun.

Struktur dipahami sebagai realitas yang dilihat sebagaimana adanya yang diletakkan sebagai sebuah sistem. Dalam hal ini lembaga pendidikan merupakan bagian dari struktur realitas. Oleh karenanya, pendidikan seharusnya dapat mengarahkan peserta didik untuk dapat melihat sistem yang menjadi sasarannya untuk membuka sistem yang membelenggu dirinya. Sebagai contoh munculnya keterasingan karena diskriminasi peran kelompok minoritas dalam kelompok mayoritas masyarakat atau munculnya keterasingan seseorang karena kemiskinan dilihat karena adanya sistem realitas yang mengitarinya tidak memungkinkan seseorang untuk dapat keluar dari gubangan sistem yang membelenggu. Biasanya dalam diskriminasi menandakan adanya penindasan, peminggiran dan ketidakadilan sosial. Karena adanya unsur superioritas kelompok atau sistem terhadap kelompok lainnya. Ada banyak faktor mengapa pendidikan sering ditampilkan dalam corak diskriminatif. Salah satunya adalah adanya klaim kebenaran yang tidak disertai dengan adanya pemahaman kemajemukan.

Faktor ini dapat dicermati dari pelaksanaan pendidikan agama dengan nalar eksklusif. Secara harfiah eksklusif berarti sendirian, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, semata-mata dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Secara sosial pengertian ini dipahami sebagai sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran dan prinsip diri sendirilah yang paling benar. Sementara keyakinan, pandangan, pemikiran dan prinsip yang dianut orang lain adalah sesat, salah dan harus dijauhi. Tentunya, pendapat seperti ini akan berdampak pada peminggiran saran dan pemikiran yang berasal dari kelompok lainnya. Eksklusifitas pendidikan agama ini terjadi karena beberapa hal, pertama, pendidikan agama yang dikembangkan telah terbakukan melalui penafsiran-penafsiran tertentu yang diresmikan oleh lembaga-lembaga keagamaan tertentu, kemudian diajarkan kepada masyarakat. Sebagai dampak penafsiran ini agama yang semula memesankan pada pembebasan pada akhirnya kehilangan pesan kemanusiaan sebagai agama pembebas dan ideologisasi yang berakibat pada dehumanisasi.

Ketika agama mengalami proses pelembagaan yang berlebihan maka yang terjadi adalah pembungkaman kekayaan penafsiran, di luar tafsir resmi yang diakui oleh lembaga berwenang mustahil ada tafsir lain yang diakui kebenarannya. Kitab suci agama yang semula terbuka kepada tafsir dibungkam suaranya menjadi hanya berbunyi satu tafsir. Masyarakat agama yang di luar daerah tafsir resmi tersebut akan dicap murtag atau bid'ah. Proses dialogis pada tataran ini dimungkinkan tidak lagi terdapat tempat yang selayaknya.

Suasana seperti ini dapat dicermati pada kasus lembaga pendidikan agama di Indonesia, umumnya juga terjadi di lembaga pendidikan agama seluruh dunia Islam. Di Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan agama banyak didirikan oleh lembaga-lembaga sosial keagamaan tertentu, misalkan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Ahmadiyah dan lembaga sosial keagamaan lainnya, adalah merupakan contoh sebuah pengkaderan paham atas tafsir agama tertentu. Walaupun model seperti ini dibenarkan menurut ilmu sosiologi, namun pengkotak-kotakkan ini pada akhirnya menimbulkan mazhab dari kelompok tertentu yang secara tidak sadar telah menimbulkan fanatisme mazhab dari kelompok tertentu pula, jika proses pembelajaran agama tidak dibarengi dengan pemahaman multitafsir. Corak seperti ini tentunya tidak menguntungkan bagi pengembangan nalar kritis pluralis di tengah masyarakat yang multi etnis.

Kedua, adanya keterasingan manusia sebagai peserta didik atas lingkungan sekitarnya. Konsep ini berangkat dari hakekat manusia yang pada intinya adalah bebas dan merdeka. Pendidikan agama seharusnya bertolak dari pengenalan dirinya sendiri dan realitas lingkungan manusia. Seringkali, pendidikan dianggap sebagai investasi material untuk meneruskan tradisi dan kekayaan intelektual dari generasi kepada generasi selanjutnya. Model ini disebut dengan sistem pendidikan bank (*banking education system*). Disebut demikian karena dalam prakteknya pendidikan hanyalah proses pengalihan pengetahuan (*transfer of knowledge*). Dari sini dipahami atau tidak proses seperti ini akan menimbulkan nalar eksklusif karena pada dasarnya sistem pendidikan yang dikembangkan menganut sistem searah dan tidak menampilkan sistem dialogis.

Dalam konteks edukasi selama tidak ada kesadaran dialogis yang mengarah kepada kualitas kesadaran dan pengetahuan yang memadai, peserta didik akan terus bungkam meskipun berada di bawah tekanan struktural atau sistem sosial. Akibatnya, peserta didik tidak mengkreasi sejarah dan budayanya sendiri. Situasi terbungkam inilah yang menimbulkan kebudayaan bisu (*culture of silence*). Secara filosofis, dalam pandangan yang sama tapi dalam bahasa yang berbeda, bahwa pendidikan agama yang dikembangkan masih berkuat pada dataran normativitas teks agama kurang memperhatikan aspek historisitas kekinian teks. Ajaran agama yang bersifat normaif telah diklaim sebagai yang bersumber dari Tuhan yang suci, bersifat samawi, bersifat sakral, bersifat menjadi agama yang mempunyai keunikan ciri yang spesifik sekaligus membedakannya dari jenis pengalaman budaya dan sosial keagamaan. Jika klaim kebenaran berbenturan dengan historisitas teks agama yang bergulat dengan faktor kepentingan, baik kepentingan kelompok, golongan, etnis, birokrasi, maka akan muncullah ketegangan antar penafsiran atas historisitas teks agama. Penafsiran agama yang diklaim sebagai agama itulah yang kemudian rentan akan memunculkan konflik. Karena konflik diidentifikasi sebagai penafsiran tunggal yang diklaim sebagai sebuah kebenaran agama secara absolut yang mengesampingkan terhadap kebenaran agama lain.

Seringkali dijumpai dalam doktrin agama selalu menggunakan sistem pemahaman pengajaran agama dengan mengaggas pendekatan konflik yang tanpa disadari telah mengarahkan pada eksklusivitas pluralisme agama. Wacana iman versus kafir, muslim versus non-muslim, surga versus neraka menjadi bahan kurikulum yang dogmatik. Pelajaran teologi seperti itu memang tidak dapat dihindari namun pengajaran itu hanya diajarkan sekedar memperkuat keimanan dan pencapaiannya menuju surga tanpa dibarengi dengan kesadaran berdialog dan perlunya transformasi sosial ajaran agama. Akibatnya, tentulah sangat fatal yakni paradigma eksklusif doktrinal yang menciptakan kesadaran umat agama untuk memandang umat agama lain secara antagonis. Oleh karenanya, pendidikan agama harus melakukan reorientasi filosofis paradigmatis tentang bagaimana membentuk kesadaran peserta didik berwajah inklusif tanpa harus menghilangkan kesadaran akan keyakinannya.

## Penutup

Islam, pendidikan dan radikalisme adalah tiga kata yang saling terkait. Munculnya garis keras atas nama agama (baca Islam) sebenarnya merupakan dampak pendidikan yang berdasarkan tafsir agama. Pesan-pesan agama dan ideologi pada masa awal kehadirannya yang lebih cenderung pada upaya pembebasan sirna ditelan oleh proses-proses historis yang mendistorsikannya. Agama Kristen, Katholik, Islam, Hindu dan seterusnya juga idologi sosialisme, kapitalisme dan lainnya, kini dihadapkan kepada krisis yang terbuka maupun tersembunyi di tengah dunia dan umat manusia yang tengah berubah. Perubahan itu rasanya mengarah ke kiris yang dikarenakan agama dan ideologi berubah menjadi sebuah hirarki kelembagaan di mana yang berkuasa adalah wewenang tertentu yang berhak berkata mengenai kebenaran atas nama otoritas mutlak tertentu, baik itu atas nama Tuhan, pihak yang berkuasa, kelas agama atau yang lainnya. Teks suci agama-agama dan teks ideologi yang semula berisi pesan-pesan universal kemudian dibakukan melalui penafsiran tertentu yang diresmikan oleh lembaga agama dan ideologi, untuk kemudian diajarkan kepada umat atau masyarakat sebagai sesuatu yang selesai, lengkap serta kedap kritik lewat lembaga pendidikan. Peresmian itu akhirnya mempunyai

konsekuensi yang fatal, agama kehilangan pesan profetisnya sebagai agama kemanusiaan dan ideologi berakibat kepada dehumanisasi.

Beberapa antisipasi pengembangan pengembangan lembaga pendidikan Islam seperti yang didiskusikan tersebut merupakan antisipasi di masa depan dalam upaya menghadapi perkembangan akan kebutuhan pendidikan di tengah masyarakat yang majemuk. Masyarakat multikultural sangat membutuhkan tenaga profesional yang digembleng di lembaga pendidikan. Oleh karenanya, terdapat tantangan lembaga pendidikan agama Islam antara idealisme dakwah Islam dan tuntutan praktis. Apakah lembaga pendidikan Islam tetap pada idealismenya ataukah hanyut dalam dunia pragmatisme. Jawaban dari pertanyaan ini dibutuhkan analisis yang komprehensif supaya idealisme pendidikan Islam tidak luntur, begitu juga pendidikan Islam tidak ketinggalan dengan kemajuan masyarakat industri yang kompleks begitu cepat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, "Pengajaran Kalam dan Teologi di Era Kemajemukan: Sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama," dalam Jurnal *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 11 tahun 2001.
- al-Jabiri, *al-'Aql al-Akhlāqī al-'Arabi: Dirasah Tahliyyah Naqdiyyah li Nuzhum al-Qiyam fi al-Tsaqafah al-'Arabiyyah*, Beirut; Markaz Dirasah al-Wihdah, 2001.
- , *al-'Aql al-Siyasi al-'Arabi: Muhaddidah wa Tajalliyah*, Beirut; Markaz Dirasah al-Wihdah al-'Arabi, 1992.
- , *al-Din wa al-Daulah wa Tathbiq al-Syari'ah*, Beirut; Markaz Dirasah al-Wihdah al-'Arabi, 1996.
- , *al-Turast wa al-Hadastah: Dirasah wa Munaqasah*, Beirut; al-Markas al-Tsaqafi al-'arabi, 1991.
- , *Bunyah al-'aql al-'Arabi: Dirasah Tahliyyah li Nuzhum al-Ma'rifah fi Tsaqafah al-'Arabiyyah*, Beirut; Markaz Dirasah al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1992.
- , *Isykaliyat al-Fikr al-'Arabi al-Ma'asyir*, Libanon; Markaz Dirasah al-wahdah al-'Arabiyyah, 1994.
- , Muhammad Abid, *at-Turast wa al-Hadastah: Dirasah wa Munaqasat*, Beirut; al-Markaz as-Siqafi al-'Arabi, 1991.
- , *Nahnu wa Turats: Qira'ah Mu'assirah fi Turast al-Falsafi*, Beeirut; Dar al-Baidla, 1998.
- , *Takwin al-'Aql al-'Arabi*, Beirut; Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabi, 1991.
- Arif, Saiful, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta; Logos, 2002.
- Dodge, Bayard, *al-Azhar: a Millenium of Muslim Learning*, Washington D.C: The Mindle East Institute, 1961.
- Fakih, Mansur, "Ideologi dalam Pendidikan: Sebuah Pengantar," dalam William F. O'neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, penerj., Omi Intan Naomi, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001.
- , *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996.
- , *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Freire, Paulo, dkk., *Menggugat Pendidikan; Fundamentalis, Konservatif, Liberal dan Anarkis*, penerj. Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- , *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- , *Cultural Action For Freedom*, New York; Penguin Book, 1970.
- , *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta; LP3ES, 1985.
- Haque, Ziaul, *Wahyu dan Revolusi*, penerj., E. Setiyawati al Khattab, Yogyakarta: LKis, 2000.
- Illich, Ivan, *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*, penerj. A. Sonny Keraf, Jakarta: Yayasan Obor, 2000.
- Kartono, Kartini, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*, Jakarta: Pradya Paramita, 1997.
- Madjid, Nurcholish, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: Media Cita, 2000.
- Muthali'in, Ahmad, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Riyadi, Ahmad Ali, *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2006.
- Watt, W. Montgomery, *The Majesty That Was Islam*, London; Sidgwick & Jackson, 1976.



*The 9<sup>th</sup> Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)*

*Surakarta, 2-5 November 2009*